**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 MENGENAI RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
(Studi Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon)**

Maria Ulfah¹, Asnawi², Ayang Fristia Maulana³

mulfah910@gmail.com¹, srgasnawi@gmail.com², fristia.maulana@gmail.com³

Universitas Bina Bangsa

Abstrak: Pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Cilegon belum dilaksanakan secara optimal, Masyarakat yang dipungut retribusi pelayanan kebersihan seharusnya dapat merasakan pelayanan kebersihannya, tetapi karena dengan peningkatan volume sampah yang tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan kebersihan mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan maksimal. Tujuan dari penelitian ini Untuk Mengetahui Analisis Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan serta Untuk Mengetahui Kendala Pemerintah Kota Cilegon dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Empiris dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan observasi, wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Seperti temuan lapangan yang peneliti dapatkan ketika turun ke lapangan, bahwasannya masyarakat masih banyak yang belum patuh terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Misalnya dalam hal ini kepatuhan untuk membuang sampah pada tempatnya dan membayar retribusi sampah, yang mana semestinya hal tersebut wajib dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon seharusnya dapat mengantisipasi dari timbulan sampah yang terjadi akibat lonjakan penduduk yang signifikan. Antisipasi tersebut baik dari kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana, SDM, sampai pada kerjasama dengan pihak swasta dan pihak terkait lainnya.

Kata Kunci: Retribusi Pelayanan Kebersihan, Pemerintah Daerah.

Abstract: The collection of cleanliness service fees in the City of Cilegon has not been carried out optimally. The community members who are charged these fees should be able to benefit from the cleanliness services. However, due to the increase in waste volume not being matched by an improvement in cleanliness services, the community is not receiving optimal service. The objective of this study is to analyze the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2012 regarding Waste Management/Cleanliness Service Fees and to identify the challenges faced by the Cilegon City Government in collecting cleanliness service fees. The research method used is empirical legal research with a legislative and sociological approach, based on primary data collected through observations, interviews, and secondary data processed from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Field findings indicate that many citizens are still not complying with the regulations set by the government. For instance, compliance with proper waste disposal and the payment of waste service fees, which should be a mandatory responsibility for all citizens. Based on this, the Cilegon City Government, through the Cilegon City Environmental Agency, should be able to anticipate the waste generated due to the significant population increase. This anticipation should cover both the quality and quantity of facilities and infrastructure, human resources, and cooperation with private sectors and other relevant parties.

Keywords: Cleanliness Service Fees, Regional Government.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pembangunan di daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan daerah menjadi lebih besar untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang hakikatnya untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu. Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah/kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangan seperti: pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber pendapatan asli daerah, yakni:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Salah satu jenis dari retribusi jasa umum adalah Retribusi Pelayanan Kebersihan. Kewenangan pemungutan retribusi kebersihan di Kota Cilegon secara teknis dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon berdasarkan pasal 32 Peraturan Walikota Cilegon Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Setiap tahunnya jumlah penduduk meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, perkembangan industri yang sangat pesat, dan untuk menciptakan Kota yang bersih dan nyaman di Kota Cilegon maka harus dilakukan peningkatan pelayanan kebersihan di lingkungan perkampungan maupun perkotaan, seperti, lingkungan permukiman, perkantoran, rumah sakit, sekolah, industri dan pabrik-pabrik, ruko, hotel/restoran, tempat hiburan, dan pusat perbelanjaan. Untuk memberikan pelayanan kebersihan yang maksimal diperlukan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memadai serta armada pengangkutan sampah yang cukup.

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kebutuhan pembiayaan yang sangat besar oleh Pemerintah Kota Cilegon untuk pelayanan kebersihan, yang memerlukan peran serta masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi pelayanan kebersihan.

Retribusi pada umumnya mempunyai manfaat yang dapat dirasakan secara langsung karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan timbal balik secara langsung dari pemerintah. Dalam rangka untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan kota yang memenuhi tuntutan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, maka perlu didukung sarana dan prasarana pelayanan kebersihan yang memadai serta diperlukan kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya kebersihan salah satunya dengan membayar retribusi kebersihan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari dua kata: metode dan penelitian. Metode merujuk pada kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,

termasuk keabsahannya.

Penelitian Hukum adalah penelitian yang berfokus pada hukum, baik sebagai ilmu atau kumpulan aturan dogmatis maupun sebagai sesuatu yang berhubungan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Empiris. Penelitian Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa penelitian fisik maupun arsip.

Cara memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian, penulis menggunakan teknik penelitian secara langsung maupun secara online dengan tujuan agar bisa mendapatkan data dan fakta yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Mengenai Retribusi Pelayanan/Persampahan Di Kota Cilegon

Seperti temuan lapangan yang peneliti dapatkan ketika turun ke lapangan, bahwasannya masyarakat masih banyak yang belum patuh terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Misalnya dalam hal ini kepatuhan untuk membuang sampah pada tempatnya dan membayar retribusi sampah, yang mana semestinya hal tersebut wajib dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat. Lalu dalam hal ini respon masyarakat terhadap kebijakan retribusi persampahan masih banyak yang acuh atau tidak peduli. Masyarakat lebih memilih membuang sampah secara pribadi (ditangani sendiri dengan cara membuang pada aliran sungai atau dibakar) dibandingkan harus membayar jasa pengangkut sampah setiap harinya/setiap bulan nya dikarenakan masalah kondisi ekonomi. Tingkat kepatuhan dan respon masyarakat yang masih dianggap kurang mendukung program pemerintah, menyebabkan terhambatnya pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini keharusan untuk melakukan tindakan tertentu adalah kewajiban untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Selain itu juga ditemukan peneliti ketika di lapangan yaitu, petugas pengambil/pemungut sampah dan masyarakat masih belum memahami dengan betul bagaimana seharusnya proses pembuangan sampah yang benar. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh petugas sampah setempat memiliki perbedaan, dimana ada yang memang membuang sampah tersebut pada TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang mana nantinya akan dibawa oleh petugas sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon ke TPSA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir). Namun ada juga yang langsung membuang sampah ke TPSA, tidak ke TPS terlebih dahulu. Hal tersebut disebabkan masih adanya petugas sampah dari Dinas Lingkungan Hidup yang meminta bayaran lebih (pungli/pungutan liar) untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPSA.

Kurangnya sosialisasi yang diberikan, membuat masyarakat tidak mengerti kewajiban mereka, tidak mengerti bagaimana seharusnya membuang sampah yang baik dan benar, tidak mengetahui bahwa retribusi persampahan tersebut terdapat pada peraturan daerah yang mana artinya semua

masyarakat patut menaatinya sebagai warga negara yang baik.

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan retribusi sampah tersebut belum mencukupi atau masih kekurangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksudkan disini adalah Petugas Sampah di lapangan. Hanya ada 3 petugas sampah yang bertugas di lapangan. Hal tersebut menyebabkan beberapa wilayah tidak memiliki Petugas Sampah, sehingga sebagian masyarakat masih membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya.

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam hal retribusi yang mengatur mengenai pemungutan retribusi pelayanan kebersihan. Peraturan Daerah ini mengatur tentang besarnya tarif yang dikenakan pada retribusi pelayanan kebersihan, bagaimana cara pemungutannya di Kota Cilegon yang diatur lebih lanjut pada Peraturan Walikota Cilegon Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan merupakan pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:

- a. Pengambilan / pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh pemerintah daerah

1. Kepala Bidang Kebersihan mengajukan permohonan karcis berupa nota dinas kepada Kepala Dinas Cq. Kasubag. Umum dan kepegawaian.
2. Kasubag. Umum dan Kepegawaian memberikan persetujuan atas permohonan karcis dan membuat bukti serah terima karcis ke Bidang Kebersihan
3. Kepala Bidang Kebersihan memberikan karcis kepada kolektor dengan bukti serah terima karcis
4. Kolektor melakukan pemungutan retribusi pelayanan Persampahan/ Kebersihan kepada wajib retribusi dengan memberikan bukti pembayaran berupa karcis
5. Wajib retribusi membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada kolektor
6. Kolektor menyetorkan hasil retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan ke Bidang Kebersihan sesuai dengan karcis yang terpakai untuk setoran harian paling lambat 1 x 24 jam.
7. Bidang Kebersihan melaporkan dan menyetorkan hasil retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ke Bendahara Penerimaan
8. Bidang Kebersihan menerima tanda bukti pembayaran sebagai tanda bukti setoran dari Bendahara Penerimaan
9. Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ke kas daerah kota Cilegon melalui Bank
10. Bendahara Penerimaan menerima Surat Tanda Setoran (STS) sebagai tanda bukti setoran.

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

MASYARAKAT => KOLEKTOR => DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Secara umum, pemungutan retribusi pelayanan kebersihan dimulai dari masyarakat yang membayar retribusi melalui kolektor dan selanjutnya oleh kolektor disetorkan kepada Dinas

Lingkungan Hidup.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam proses pemungutan retribusi di perusahaan/industri lebih ketat dibandingkan pemungutan di perumahan/permukiman di karenakan setiap perusahaan/industri diwajibkan mempunyai surat izin dari Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) apabila sampah nya ingin diangkut oleh transporter pengangkutan sampah, dan apabila sudah memiliki ijin perusahaan/industri tersebut akan tercatat di data wajib retribusi dan akan ditagih setiap bulan nya. Dinas Lingkungan Hidup juga bekerjasama dengan Pihak swasta untuk mengangkut sampah perusahaan/industri tersebut jadi memudahkan untuk memproses pengangkutan sampah dan pemungutan retribusi nya.

Sedangkan untuk perumahan/permukiman tidak diwajibkan memiliki surat izin seperti halnya perusahaan/industri, hanya saja apabila sampah nya ingin diangkut harus memiliki izin dari pihak transporter pengangkutan sampah dan ada beberapa perumahan saja yang tercatat dalam data wajib retribusi, ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup. dalam proses pemungutan retribusi nya pun diawali dari masyarakat lalu di stor kan melalui kolektor baru ke Dinas Lingkungan Hidup, permasalahan nya yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengerti/paham cara menyetorkan retribusi melalui kolektor itu seperti apa.

Kendala Pemerintah Kota Cilegon Dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, didalamnya terdapat kendala- kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon baik kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala internal yang dihadapi diantaranya kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia masih kurang memadai dibandingkan dengan permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- a. Kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia masih kurang memadai dibandingkan dengan permasalahan yang dihadapi.
- b. Keterbatasan anggaran. Hal ini disebabkan karena tidak maksimalnya pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Cilegon berdasarkan potensi yang ada. Masih banyak pemungutan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak swasta hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya pemasukan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sehingga keterbatasan anggaran menjadi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan.
- c. Masih lemahnya aspek pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diterapkan. Ilmu pengetahuan disini merupakan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan sampahnya.
- d. Kurangnya pola kemitraan, kesetaraan dan kesempahaman dengan pelaku usaha dalam pelaksanaan upaya-upaya kelestarian lingkungan.
- e. Masih rendahnya etos kerja dan disiplin aparatur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- f. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah disahkan Kepala Dinas sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
- g. Penegakan hukum masih lemah terhadap pelaku usaha yang masih lalai membayar retribusi pelayanan kebersihan. Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pasal 14 menyebutkan bahwa dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar. Namun pada implemenasinya sanksi tersebut tidak diterapkan
- h. Rendahnya kualitas dan tingkat pengelolaan persampahan. Tingkat pelayanan sampah sampai saat ini baru mencapai 40%, dengan kualitas pelayanan yang belum memadai. Kondisi tersebut masih jauh dari standar pelayanan yang telah ditetapkan yaitu 60% dengan pelayanan pengumpulan dan pengangkutan minimal seminggu 2 kali. Kendala eksternal yang dihadapi.

KESIMPULAN

Respon masyarakat terhadap kebijakan retribusi persampahan masih banyak yang acuh atau tidak peduli. Masyarakat lebih memilih membuang sampah secara pribadi (ditangani sendiri dengan cara membuang pada aliran sungai atau dibakar) dibandingkan harus membayar jasa pengangkut sampah setiap harinya/setiap bulan nya dikarenakan masalah kondisi ekonomi. Tingkat kepatuhan dan respon masyarakat yang masih dianggap kurang mendukung program pemerintah, menyebabkan terhambatnya pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini keharusan untuk melakukan tindakan tertentu adalah kewajiban untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2008 (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), hlm. 17.
Hamdi, Muchlis, Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi, (Bogor : Indonesia,2014) hlm.10
Tim Redaksi Fokus Media, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Bandung.: Penerbit Fokus Media, 2009)
Mertokusumo, Sudikno, Penemuan hukum: sebuah pengantar, (Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm. 14
Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215.
Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm. 42

Jurnal

- Mulyani Febriyanti, Wika Hardika Legiana, & Dinar Sugiana Fitrayadi “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Cilegon” Jurnal Ke warganegaraan, Vol 6 No.1 (2022) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, hlm. 105
Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T, Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekon omi, & Akuntansi (MEA), hlm. 392-408.
Iryadi Iriyadi, Kepastian Hukum Kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara (Le gal Certainty of The Position Sub-district Head as Temporal Land Deed Officer). Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 11 No.1 Tahun 2020, hlm. 11 Mulyani Febriya
nti, Legiana, Fitriyandi “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Cilegon” Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No. 1 Thn (2022) Hlm 104-111
Ibnu Artadi, Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 2006, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.

Perundang-undang

- Pasal 18 Undang-Undang Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah
Pasal 1 Undang-Undang Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 18 Tahun. 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Thau 2016 Tentang Perangkat Daerah
Pasal 1 Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Pasal 1 Ayat 68 Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum